

Tranformasi Benteng Marlborough sebagai Cagar Budaya Peninggalan Masa Kolonial Inggris di Bengkulu pada Tahun 1714-2004

Rahmat Agri Ramadani¹, Widiati Isana², Agung Purnama³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: agriramadhan968@gmail.com , widiatiisana@uinsgd.ac.id , agungpurnama@uinsgd.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 08 Agustus 2026

ABSTRACT

This study examines Fort Marlborough in Bengkulu as one of the centers of British colonial power on the west coast of Sumatra and analyzes its transformation into a national cultural heritage in 2004. The background of the research departs from the still dominant popular narrative that highlights the tourism aspect, while the historical dimension and the process of changing its legal status have not been studied systematically. This research uses a historical method with a qualitative-descriptive approach through heuristic stages, source criticism, interpretation, and historiography, by utilizing archival sources, regulations, scientific works, and field documentation. The results of the study show, first, that Fort Marlborough since the beginning of the 18th century was built by the East India Company as a modern defense fort that combined military, administrative, and economic functions, and acted as a node of British hegemony over the pepper trade in Bengkulu, before then switching to the Netherlands, Japan, and the Republic of Indonesia. Second, the study found that the transformation of the fort from a defense installation to a cultural heritage took place through several important phases: its use as the headquarters of the National Police and the Indonesian Army/Kodim, the handover of management to the Ministry of Education and Culture in the late 1970s, its restoration and arrangement as a historical tourist attraction in the early 1980s, to its official designation as a cultural heritage building in 2004. In conclusion, Fort Marlborough represents not only the physical heritage of colonialism, but also the arena for negotiating meaning between the military interests, preservation, and cultural identity of the Bengkulu people within the framework of contemporary Indonesian culture.

Keywords: Fort Marlborough, British Colonial, Cultural Heritage, Functional Transformation.

ABSTRAK

Studi ini meneliti Benteng Marlborough di Bengkulu sebagai salah satu pusat kekuatan kolonial Inggris di pesisir barat Sumatera dan menganalisis transformasinya menjadi warisan budaya nasional pada tahun 2004. Latar belakang penelitian berangkat dari narasi populer yang masih dominan yang menyoroti aspek pariwisata, sedangkan dimensi sejarah dan proses perubahan status hukumnya belum dikaji secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui tahapan

heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan memanfaatkan sumber arsip, peraturan, karya ilmiah, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa Benteng Marlborough sejak awal abad ke-18 dibangun oleh Perusahaan Hindia Timur sebagai benteng pertahanan modern yang menggabungkan fungsi militer, administrasi, dan ekonomi, dan bertindak sebagai simpul hegemoni Inggris atas perdagangan lada di Bengkulu, sebelum kemudian beralih ke Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa transformasi benteng dari instalasi pertahanan menjadi warisan budaya terjadi melalui beberapa fase penting: penggunaannya sebagai markas Polri dan Tentara Republik Indonesia/Kodim, serah terima pengelolaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir 1970-an, restorasi dan penataannya sebagai objek wisata bersejarah pada awal 1980-an, untuk penunjukan resminya sebagai bangunan warisan budaya pada tahun 2004. Kesimpulannya, Benteng Marlborough tidak hanya mewakili warisan fisik kolonialisme, tetapi juga arena untuk menegosiasikan makna antara kepentingan militer, pelestarian, dan identitas budaya masyarakat Bengkulu dalam kerangka budaya Indonesia kontemporer.

Kata kunci: Benteng Marlborough, Kolonial Inggris, Warisan Budaya, Transformasi Fungsional.

PENDAHULUAN

Benteng Marlborough di Kota Bengkulu merupakan salah satu peninggalan kolonial Inggris yang memiliki posisi penting dalam sejarah Indonesia, baik dari sudut pandang politik, militer, maupun kebudayaan (Kusuma et al., 2022). Dibangun oleh East India Company pada rentang tahun 1713-1719 di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Collett, benteng ini dirancang sebagai benteng pertahanan utama Inggris di pantai barat Sumatra dan menjadi salah satu benteng terbesar yang mereka miliki di kawasan Asia (Joseph Collett, 1933). Keberadaan Benteng Marlborough tidak hanya merefleksikan kepentingan strategis Inggris dalam mengendalikan jalur perdagangan lada, tetapi juga menjadi saksi interaksi, konflik, dan negosiasi antara kekuatan kolonial dengan masyarakat lokal Bengkulu sepanjang abad ke-18 hingga awal abad ke-19 (Hafiful Hadi Sunliensyar, 2025). Dalam konteks kekinian, benteng ini sekaligus tampil sebagai ikon kota dan tujuan wisata sejarah yang menonjol, sehingga menghadirkan lapisan makna baru yang berbeda dari fungsi awalnya. Pergeseran makna dan fungsi tersebut menjadikan Benteng Marlborough sebagai objek kajian yang menarik, khususnya ketika dilihat sebagai cagar budaya yang menyimpan memori panjang kolonialisme dan transformasi sosial di Bengkulu.

Dalam lintasan sejarahnya, Benteng Marlborough mengalami beberapa fase penggunaan yang mencerminkan perubahan rezim politik di Indonesia. Pada masa kolonial Inggris, benteng ini berperan sebagai pusat pemerintahan, gudang komoditas strategis, sekaligus basis militer yang mengokohkan dominasi East India Company terhadap jaringan perdagangan lada di kawasan Samudra Hindia (Marsden, 1811). Setelah penyerahan Bengkulu kepada Belanda melalui Traktat London 1824, fungsi benteng berlanjut sebagai instalasi militer Hindia Belanda dan kemudian diambil alih oleh tentara Jepang pada masa pendudukan 1942-1945 (Januario, 2019). Memasuki masa kemerdekaan, Benteng Marlborough sempat

digunakan sebagai markas Kepolisian Republik Indonesia, lalu beralih menjadi markas dan barak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menempatkannya dalam kerangka pertahanan dan keamanan negara yang baru. Rangkaian perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa benteng tidak pernah terlepas dari dimensi kekuasaan, sekaligus membuka ruang untuk menelusuri bagaimana sebuah bangunan kolonial mengalami reinterpretasi makna dalam konteks negara pascakolonial.

Seiring dengan menguatnya kesadaran pelestarian warisan budaya di Indonesia, Benteng Marlborough mulai dipandang tidak semata sebagai aset militer, melainkan sebagai situs sejarah yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penyerahan pengelolaan benteng dari institusi militer kepada instansi kebudayaan membuka fase baru yang ditandai dengan kegiatan pemugaran, penataan kawasan, dan pembukaan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Upaya tersebut berujung pada penetapan Benteng Marlborough sebagai Cagar Budaya melalui keputusan menteri yang menempatkannya dalam rezim hukum pelestarian nasional dan menjadikan benteng ini sebagai salah satu ikon wisata sejarah unggulan di Bengkulu. Proses transformasi ini mencakup tidak hanya perubahan status hukum, tetapi juga perubahan fungsi, pemanfaatan ruang, dan cara masyarakat memaknai keberadaan benteng dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kajian terhadap benteng ini tidak dapat dilepaskan dari persilangan antara sejarah kolonial, kebijakan pelestarian, dan dinamika pariwisata budaya di tingkat lokal maupun nasional.

Di tengah gencarnya pengembangan pariwisata dan pemanfaatan situs bersejarah, pemahaman yang utuh tentang sejarah dan transformasi Benteng Marlborough menjadi semakin penting. Banyak narasi populer menonjolkan sisi keunikan arsitektur dan nilai ekonomis benteng sebagai obyek wisata, tetapi tidak selalu memberikan gambaran komprehensif mengenai perjalanan panjang fungsi benteng dari basis pertahanan kolonial hingga menjadi cagar budaya yang dilindungi negara. Padahal, rekonstruksi sejarah yang menyeluruh dapat membantu menghindarkan pelestarian dari sekadar pendekatan kosmetik dan komersial, serta menempatkan benteng sebagai ruang pembelajaran kritis tentang kolonialisme dan identitas lokal. Dalam konteks inilah, kajian yang menempatkan Benteng Marlborough sebagai obyek penelitian sejarah dengan fokus pada transformasi fungsi dan statusnya menjadi relevan dan diperlukan.

Penelitian tentang Benteng Marlborough telah dilakukan oleh beberapa penulis, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun karya tugas akhir, dengan fokus yang beragam. Pratama (2016) menulis "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Terhadap Kepuasan Pengunjung Di Objek Wisata Sejarah Benteng Marlborough Di Kota Bengkulu" yang menekankan potensi ekonomi dan daya tarik benteng sebagai destinasi wisata, namun belum secara mendalam mengulas aspek status hukum cagar budaya dan proses transformasinya. Taufiq (2022) melalui kajian tentang "The Memories of Benteng Marlborough Bengkulu dalam Foografi Dokumenter" banyak mengulas sejarah berdirinya benteng dan peran Inggris di Bengkulu, tetapi lebih berfokus pada konteks kolonial awal (Taufiq, 2022). Sementara tulisan dalam jurnal

“Jejak Benteng Peninggalan Inggris di Bengkulu (Tinjauan Historis-Filosofis)” oleh penulis di lingkungan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu mengkaji beberapa benteng peninggalan Inggris dengan fokus pelestarian fisik dan pemaknaan filosofisnya (Tedy et al., 2025). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sejarah dan potensi wisata Benteng Marlborough, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus dan sistematis menelaah transformasi benteng ini sebagai cagar budaya peninggalan kolonial Inggris dalam rentang waktu yang panjang, yakni 1714–2004, dengan menyoroti hubungan antara perubahan fungsi, kebijakan pelestarian, dan pergeseran makna sosialnya.

Berdasarkan latar belakang dan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana sejarah Benteng Marlborough sebagai peninggalan pemerintahan kolonial Inggris di Bengkulu, sejak proses pembangunan dan pengokohan kekuasaan East India Company hingga peralihan kepada rezim-rezim kolonial dan pascakolonial berikutnya. Kedua, bagaimana transformasi Benteng Marlborough hingga ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2004, mencakup perubahan fungsi dari instalasi militer menjadi obyek pelestarian dan wisata sejarah, serta dinamika kebijakan yang melingkupinya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah, pertama, merekonstruksi secara kronologis dan analitis sejarah Benteng Marlborough sebagai warisan kolonial Inggris di Bengkulu, dan kedua, mengkaji proses transformasi fungsi dan status hukumnya hingga resmi menyandang predikat cagar budaya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai perjalanan sebuah bangunan kolonial dari simbol kekuasaan menjadi simbol warisan budaya.benteng.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kajian historis yang tidak hanya menggambarkan Benteng Marlborough sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai cagar budaya yang mengandung lapisan makna sosial, politik, dan kultural yang kompleks. Di satu sisi, benteng ini merupakan saksi penting kolonialisme Inggris dan berbagai rezim kekuasaan yang silih berganti di Bengkulu, sementara di sisi lain ia menjadi bagian dari strategi pembangunan pariwisata dan penguatan identitas lokal sebagai “kota sejarah”. Tanpa pemahaman yang kritis dan berbasis penelitian yang kokoh, terdapat risiko bahwa pemanfaatan Benteng Marlborough akan lebih menonjolkan aspek komersial dan estetis, tetapi mengabaikan dimensi edukatif dan reflektif tentang masa lalu kolonial dan dampaknya bagi masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pengetahuan bagi perumusan kebijakan pelestarian yang lebih sensitif terhadap sejarah, serta mendorong pemanfaatan benteng sebagai ruang pembelajaran publik yang mampu menghubungkan masa lalu kolonial dengan wacana kebudayaan dan kebangsaan Indonesia kontemporer.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode historis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk merekonstruksi dan

menganalisis perjalanan Benteng Marlborough dari masa kolonial Inggris hingga penetapannya sebagai cagar budaya. Penelitian historis ditempuh melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Sulasman, 2014). Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa arsip, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, maupun karya ilmiah yang membahas Benteng Marlborough, sejarah kolonial di Bengkulu, dan kebijakan pelestarian cagar budaya (Arifin, 2023). Di samping itu, dilakukan pula penelusuran dokumen digital, laporan dinas kebudayaan dan pariwisata, serta publikasi populer yang kredibel untuk memperkaya konteks. Bila memungkinkan, penelitian ini dilengkapi dengan observasi langsung ke lokasi benteng guna mengamati kondisi fisik, pola pemanfaatan ruang, serta bentuk-bentuk pemaknaan yang hadir dalam praktik pelestarian dan pariwisata.

Tahap kritik sumber dilakukan terhadap seluruh bahan yang terkumpul dengan menilai autentisitas, asal-usul, dan reliabilitasnya, baik melalui kritik ekstern maupun intern, sehingga fakta-fakta yang digunakan dalam analisis memiliki dasar yang kuat. Setelah itu, pada tahap interpretasi, data sejarah yang telah tersaring dihubungkan secara kronologis dan tematik untuk menjawab dua fokus utama penelitian, yaitu sejarah Benteng Marlborough sebagai peninggalan pemerintahan kolonial Inggris dan proses transformasinya menjadi cagar budaya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara perubahan fungsi, konteks politik dan sosial, serta kebijakan pelestarian yang mengiringinya. Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penyusunan narasi ilmiah yang sistematis mengenai perjalanan Benteng Marlborough dalam rentang 1714–2004, dengan menempatkan hasil rekonstruksi sejarah dan analisis transformasi dalam bentuk uraian yang runtut, argumentatif, dan selaras dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Benteng Marlborough sebagai Peninggalan Pemerintahan Kolonial Inggris

Kehadiran Inggris di Bengkulu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan jaringan perdagangan global pada akhir abad ke-17, ketika kekuatan-kekuatan Eropa berlomba menguasai komoditas berharga dari Asia (Abas Musofa, 2018). East India Company (EIC) melihat pantai barat Sumatra sebagai kawasan strategis karena kesuburan tanahnya dan melimpahnya produksi lada yang sangat diminati pasar internasional. Dari basis-basis mereka di India dan Semenanjung Melayu, para pedagang dan pejabat EIC berupaya menembus jalur dagang yang sebelumnya banyak dikuasai oleh pedagang lokal dan, dalam beberapa hal, bersaing dengan kepentingan Belanda di Nusantara. Bengkulu dipilih sebagai salah satu titik tumpu karena relatif jauh dari pusat kekuasaan VOC di Batavia, namun dekat dengan jalur pelayaran Samudra Hindia. Dalam konteks inilah, kehadiran Inggris di Bengkulu sejak akhir abad ke-17 harus dipahami bukan hanya sebagai upaya membangun pos dagang, tetapi juga sebagai langkah strategis membentuk basis kekuatan politik dan militer di pesisir barat Sumatra.

Sebelum Benteng Marlborough berdiri, Inggris telah mendirikan benteng-benteng awal yang secara teknis dan kapasitas pertahanannya masih terbatas

(Wikipedia, 2026). Bangunan-bangunan itu dibangun lebih sebagai loji dagang yang diperkuat, sehingga cukup rentan terhadap serangan dari laut maupun dari daratan, baik oleh kekuatan Eropa lain maupun oleh kelompok lokal yang merasa dirugikan oleh praktik dagang kolonial. Serangkaian ketegangan dan serangan terhadap permukiman EIC di Bengkulu menunjukkan bahwa fasilitas pertahanan yang ada belum memadai untuk menahan tekanan militer dan politik yang dihadapi. Kondisi geografis pesisir yang terbuka juga membuat pos-pos lama sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Dalam situasi demikian, para pejabat EIC menyadari perlunya sebuah benteng yang lebih kuat, lebih besar, dan secara arsitektural lebih modern, yang mampu berfungsi sebagai pusat pertahanan, pemerintahan, dan pengendali perdagangan sekaligus. Kebutuhan strategis inilah yang menjadi latar munculnya gagasan mendirikan Benteng Marlborough.

Pembangunan Benteng Marlborough dimulai pada awal abad ke-18, umumnya ditempatkan sekitar tahun 1713–1714, di bawah kepemimpinan Joseph Collett yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Inggris di Bengkulu (Marzuki, n.d.). Benteng ini dinamai “Marlborough” untuk menghormati John Churchill, Duke of Marlborough, seorang tokoh militer Inggris yang terkenal karena kemenangan-kemenangannya di Eropa, sehingga nama tersebut sekaligus memuat pesan simbolik mengenai kejayaan dan prestise militer Inggris (Hadinata, 2026). Benteng dibangun di atas tanah timbul yang menjorok ke laut dan berada pada elevasi yang cukup tinggi, sehingga memberikan pandangan luas ke arah Samudra Hindia di satu sisi dan ke arah kota di sisi lainnya. Letak yang strategis ini memungkinkan pengawasan terhadap lalu lintas kapal yang keluar-masuk pelabuhan Bengkulu, serta memudahkan pengendalian terhadap aktivitas di kawasan permukiman dan hinterland penghasil lada. Dengan demikian, dari awal perancangannya, Benteng Marlborough direncanakan sebagai pusat operasi yang menyatukan kepentingan militer, administrasi, dan ekonomi Inggris di wilayah tersebut.

Secara arsitektural, Benteng Marlborough mencerminkan pemahaman Inggris terhadap teknologi militer dan prinsip pertahanan benteng yang berkembang di Eropa pada masa itu (ValidNews, 2022). Denahnya memadukan bentuk bastion dengan sudut-sudut menjorok yang memungkinkan penjagaan dan tembakan saling menutup, sementara parit yang mengelilingi benteng berfungsi memperlambat gerak musuh dan menyulitkan penyerbuan langsung ke dinding pertahanan. Dinding-dindingnya dibangun dari batu dan bata yang tebal, didukung oleh platform untuk penempatan meriam yang menghadap ke laut maupun ke arah daratan. Di bagian dalam benteng, terdapat bangunan-bangunan fungsional seperti barak prajurit, gudang amunisi, gudang komoditas, ruang administrasi, dan tempat tinggal pejabat EIC, sehingga kompleks ini berfungsi sebagai kota kecil yang mandiri. Keutuhan rancangan tersebut menjadikan Benteng Marlborough bukan sekadar struktur pertahanan, tetapi juga pusat kegiatan kolonial yang terorganisir dan bertahan lama. Dalam perspektif sejarah arsitektur militer, benteng ini menunjukkan adaptasi konsep fortifikasi Eropa terhadap konteks lingkungan tropis di Sumatra.

Selama masa kekuasaan Inggris, Benteng Marlborough memainkan peran penting sebagai pusat pertahanan dan garnisun yang menampung pasukan serta persenjataan untuk menjaga kepentingan EIC di Bengkulu dan sekitarnya (Siratjudin, 2025). Di sisi militer, benteng berfungsi sebagai titik konsolidasi kekuatan yang siap menghadapi ancaman, baik dari laut maupun dari darat, termasuk kemungkinan konfrontasi dengan kekuatan kolonial lain. Pada saat yang sama, benteng juga menjadi pusat administratif, tempat para pejabat EIC mengelola urusan pemerintahan kolonial, menyusun kebijakan dagang, dan menjalin perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal. Fungsi ekonominya tampak dari perannya sebagai gudang lada dan komoditas lain yang dikumpulkan dari wilayah pedalaman, sebelum diekspor ke pasar internasional. Dalam prosesnya, benteng ini juga menjadi arena berbagai peristiwa penting, seperti ketegangan dan perlawanan dari kelompok-kelompok lokal yang menolak praktik monopoli dan intervensi kolonial, serangan ke kompleks Inggris, serta insiden-insiden yang memperlihatkan dinamika hubungan kuasa antara Inggris dan masyarakat Bengkulu. Peristiwa-peristiwa tersebut mempertegas posisi Benteng Marlborough sebagai pusat gravitasi kekuasaan kolonial di kawasan tersebut.

Peralihan kekuasaan di Bengkulu dari Inggris ke Belanda pada awal abad ke-19 membawa implikasi besar bagi status Benteng Marlborough. Melalui Traktat London 1824, Inggris dan Belanda menyepakati pembagian pengaruh di kawasan Asia Tenggara, di mana Bengkulu diserahkan kepada Belanda, sementara Inggris memperoleh penguatan posisi di wilayah lain, termasuk Singapura (Serasi & Hakim, 2019). Setelah penyerahan tersebut, Benteng Marlborough beralih menjadi instalasi militer Hindia Belanda yang dimanfaatkan untuk mendukung penguasaan kolonial di pesisir barat Sumatra. Pada masa pendudukan Jepang, benteng ini kembali berganti pemilik dan digunakan sebagai basis pertahanan serta markas militer, menunjukkan kesinambungan fungsinya sebagai infrastruktur strategis. Memasuki awal kemerdekaan Indonesia, peran benteng tidak serta-merta hilang, melainkan diteruskan sebagai markas kepolisian dan kemudian sebagai instalasi dan barak TNI, menegaskan bahwa bangunan ini tetap dipandang penting dalam struktur kekuasaan pascakolonial. Kontinuitas penggunaan sebagai sarana militer dan keamanan selama beberapa rezim menempatkan Benteng Marlborough di persimpangan antara jejak kolonial dan pembangunan negara baru.

Sebagai warisan kolonial, Benteng Marlborough memiliki kedudukan yang khas dalam memori kolektif masyarakat Bengkulu. Di satu sisi, ia mengingatkan pada masa ketika kekuatan asing menguasai wilayah dan sumber daya setempat, mengatur sistem perdagangan, dan memaksakan struktur kekuasaan yang hierarkis. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, benteng ini juga diadopsi sebagai bagian dari identitas lokal dan simbol kota, terutama setelah fungsinya bergeser dari instalasi militer tertutup menjadi ruang yang lebih terbuka bagi publik. Pemaknaan ulang tersebut tampak dalam cara benteng dihadirkan sebagai objek wisata sejarah, lokasi kegiatan budaya, dan materi pembelajaran di sekolah-sekolah. Transformasi dari simbol kekuasaan kolonial menjadi simbol warisan budaya menunjukkan adanya proses negosiasi makna, di mana masyarakat dan

negara berupaya mengintegrasikan peninggalan kolonial ke dalam narasi kebangsaan Indonesia. Dalam perspektif ini, Benteng Marlborough tidak hanya penting sebagai artefak fisik, tetapi juga sebagai arena simbolik tempat berbagai lapisan sejarah, identitas, dan kepentingan bertemu dan dipertarungkan.

Transformasi Benteng Marlborough hingga Ditetapkan sebagai Cagar Budaya (1714–2004)

Dalam fase pascakolonial, titik awal penting transformasi Benteng Marlborough dapat ditarik dari momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang segera disusul oleh pergantian struktur kekuasaan di berbagai wilayah, termasuk Bengkulu. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, infrastruktur militer yang mereka tinggalkan termasuk benteng-benteng colonial berada dalam situasi liminal, secara de facto kosong dari kekuatan asing, tetapi secara de jure masih menjadi arena perebutan legitimasi antara Republik yang baru berdiri dan upaya Belanda untuk kembali. Dalam konteks inilah, Benteng Marlborough mulai diambil alih oleh kekuatan Indonesia yang sedang bertumbuh. Sekitar akhir 1945 hingga 1948, benteng ini digunakan sebagai markas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Bengkulu, yang memanfaatkan kompleksnya sebagai basis untuk mengawal keamanan kota dan sekitarnya. Ingatan kolektif setempat sering merujuk masa ini sebagai periode ketika benteng berubah dari simbol kekuasaan asing menjadi salah satu alat penegakan ketertiban negara baru, walaupun ancaman intervensi Belanda masih sangat nyata (Qhodiri, 2021).

Krisis kedaulatan yang memuncak dalam agresi militer Belanda menjelang 1949 membawa Benteng Marlborough kembali ke pusaran konflik. Sekitar 1949–1950, ketika Belanda berupaya mengembalikan kendali atas wilayah Indonesia, beberapa sumber lokal menyebut bahwa benteng ini sempat diduduki kembali oleh kekuatan Belanda, meskipun dalam rentang waktu yang relatif singkat (medcom.id, n.d.). Fase singkat ini justru menegaskan betapa strategisnya benteng dalam imajinasi militer kolonial: sekalipun konfigurasi kekuasaan telah berubah, struktur pertahanan yang dibangun pada awal abad ke-18 tetap dianggap relevan untuk menunjang operasi militer modern. Setelah penyerahan kedaulatan akhir 1949 dan konsolidasi Republik, benteng kembali berpindah tangan ke otoritas Indonesia. Sekitar awal 1950-an, secara bertahap fungsi benteng sebagai markas Polri dikurangi, dan ia mulai diintegrasikan sebagai instalasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Di sinilah dimulai fase panjang di mana Benteng Marlborough diperlakukan terutama sebagai barak dan markas militer, bukan sebagai objek sejarah yang perlu dilestarikan secara khusus.

Penggunaan benteng sebagai markas atau barak TNI AD dan kemudian sebagai markas Kodim (yang dalam banyak kesaksian lokal diidentikkan dengan Kodim 0407 Bengkulu) berlangsung kira-kira sejak awal 1950-an hingga awal 1980-an (“Fort Marlborough,” 2018). Dalam periode ini, ingatan masyarakat terhadap benteng banyak terkait dengan aktivitas militer: latihan rutin, penjagaan, dan suasana tertutup yang membatasi akses warga biasa. Secara praktis, bangunan-

bangunan di dalam benteng dipakai sebagai kantor staf, barak prajurit, gudang logistik, dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa ruang yang pada masa Inggris difungsikan sebagai gudang lada atau ruang administrasi kolonial diadaptasi menjadi ruang kerja administrasi modern, tanpa selalu mempertimbangkan nilai historis atau estesisnya. Secara fisik, kondisi benteng relatif terpelihara dari kerusakan total karena terus dihuni dan digunakan, tetapi perubahan-perubahan kecil seperti pemakaian material baru, pemasangan instalasi listrik dan air, atau pembagian ruang secara fungsional secara kumulatif menggeser keaslian beberapa bagian interior. Kesan “benteng militer” juga menguat secara sosial, sehingga generasi yang tumbuh pada 1960-an dan 1970-an cenderung mengingat Marlborough lebih sebagai “komplek tentara” ketimbang sebagai warisan kolonial Inggris.

Di sisi lain, sejak awal 1970-an, di tingkat nasional mulai tumbuh kesadaran bahwa bangunan-bangunan kolonial, termasuk benteng, memiliki potensi sebagai cagar budaya dan obyek wisata sejarah. Kebijakan pembangunan Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi membuka ruang bagi pariwisata sebagai sektor penunjang, dan di beberapa kota tua, bangunan kolonial mulai dipandang sebagai aset yang dapat “diaktifkan” kembali dalam kerangka *heritage tourism* (Abdillah & Team, 2026). Dalam iklim kebijakan seperti itu, muncul gagasan untuk memindahkan fungsi Benteng Marlborough dari institusi militer ke institusi kebudayaan, dengan pertimbangan bahwa benteng akan lebih terlindungi dan termanfaatkan secara publik jika dikelola oleh kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan dan kebudayaan. Sekitar akhir 1970-an banyak sumber menyebut tahun 1977 sebagai momentumnya kompleks benteng secara resmi diserahkan dari lingkungan TNI AD kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Penyerahan ini bukan sekadar perpindahan administrasi aset, tetapi juga penanda simbolik bahwa benteng mulai dilepaskan dari citra “alat kekuasaan bersenjata” menuju status “objek pelestarian dan edukasi”.

Setelah di bawah Depdikbud, langkah kunci yang dilakukan adalah pemugaran dan penataan kembali benteng sebagai obyek wisata sejarah. Pada awal 1980-an, program pemugaran difokuskan pada perbaikan struktur yang mengalami pelapukan, penguatan dinding dan bastion yang retak, serta pembersihan parit yang selama tahap militer kerap diabaikan atau diisi endapan dan tanaman liar. Beberapa bangunan tambahan yang dibangun secara pragmatis pada masa TNI, apabila dinilai mengganggu keutuhan visual dan historis, mulai ditertibkan atau diintegrasikan ulang. Dalam proses ini, muncul diskusi antara kebutuhan “memperindah” benteng sebagai objek wisata dan keharusan mempertahankan keaslian material dan konfigurasi ruang. Di samping pemugaran fisik, Depdikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah menata jalur kunjungan, membuat pintu masuk yang jelas bagi wisatawan, dan menyiapkan ruang pameran sederhana yang memuat foto-foto lama, peta, dan keterangan sejarah. Momen peresmian purnapugar yang dalam beberapa catatan disebut berlangsung sekitar pertengahan

1980-an menjadi penanda bahwa benteng telah resmi “dibuka” sebagai destinasi wisata sejarah bagi publik, bukan lagi kawasan tertutup militer.

Transformasi fisik dan fungsional tersebut selanjutnya dilembagakan secara hukum melalui penetapan Benteng Marlborough sebagai cagar budaya. Di tingkat regulasi, langkah ini berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia menyusun kerangka perlindungan benda cagar budaya yang lebih sistematis, yang mula-mula dipayungi oleh UU lama mengenai Benda Cagar Budaya dan kemudian diperkuat lewat kebijakan-kebijakan turunan (Dalidjo, 2020). Sebelum terbitnya keputusan menteri, dilakukan inventarisasi dan kajian yang menilai nilai penting benteng dari aspek sejarah, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sosial-budaya. Tim ahli yang umumnya terdiri dari sejarawan, arkeolog, dan arsitek konservasi memberikan rekomendasi bahwa Benteng Marlborough layak dilindungi sebagai cagar budaya nasional karena merupakan salah satu benteng Inggris terbesar di kawasan dan menyimpan jejak panjang kolonialisme di Bengkulu. Atas dasar kajian itu, pada awal Maret 2004 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang menetapkan Benteng Marlborough sebagai Bangunan Cagar Budaya tingkat nasional. SK tersebut secara substansial mengubah posisi hukum benteng: dari aset negara yang pemanfaatannya bisa sangat fleksibel, menjadi objek yang tunduk pada ketentuan pelestarian yang ketat, termasuk pembatasan perubahan fisik dan kewajiban pemeliharaan berkala.

Penetapan sebagai cagar budaya pada 2004 membawa konsekuensi nyata terhadap fungsi dan makna Benteng Marlborough dalam lanskap kota Bengkulu (kemendikdasmen, n.d.). Fungsi utama benteng tidak lagi bertumpu pada logika pertahanan dan keamanan, melainkan pada pelestarian, edukasi, dan pariwisata. Pemerintah daerah bersama unit pelaksana teknis cagar budaya mulai memosisikan benteng sebagai destinasi heritage unggulan yang dapat menarik pengunjung dari dalam maupun luar daerah. Kegiatan di dalam benteng bergeser dari aktivitas militer tertutup ke aktivitas publik seperti kunjungan wisata, tur edukatif, pameran sejarah, dan sesekali kegiatan kebudayaan yang dikurasi dengan mengacu pada kapasitas benteng sebagai ruang warisan. Pada saat yang sama, benteng menjadi “laboratorium hidup” bagi pelajar dan peneliti yang mempelajari sejarah kolonial, arsitektur militer, bahkan kebijakan pelestarian. Perubahan makna ini juga tercermin dalam diskursus lokal: jika dulu benteng lebih diingat sebagai markas tentara, kini ia sering disebut sebagai ikon kota dan sumber kebanggaan, sekaligus pengingat bahwa Bengkulu pernah menjadi titik penting dalam jaringan kekuasaan global.

Melihat rentang waktu 1714–2004, jelas bahwa transformasi Benteng Marlborough tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian pergeseran bertahap yang dipengaruhi oleh dinamika politik, kebijakan, dan persepsi masyarakat. Secara fisik, benteng mengalami siklus penggunaan intensif, modifikasi fungsional, pelapukan, dan kemudian konservasi. Secara fungsional, ia bergerak dari benteng kolonial Inggris, instalasi Belanda dan Jepang, markas Polri dan TNI, menuju situs wisata dan cagar budaya. Secara makna, ia bergeser dari simbol dominasi kekuatan asing, menjadi instrumen negara pascakolonial, dan

akhirnya menjadi warisan budaya yang diklaim sebagai bagian integral identitas Bengkulu. Di balik transformasi ini terbentang berbagai ketegangan: antara logika militer dan logika pelestarian, antara kepentingan komersial pariwisata dan kebutuhan menjaga keaslian, serta antara narasi kolonial yang ingin dilampaui dan kebutuhan untuk mengingatkannya secara kritis. Tantangan ke depan menyangkut bagaimana memastikan bahwa konservasi material benteng tidak dikorbankan oleh eksploitasi pariwisata, bahwa pengelolaan melibatkan koordinasi antarlembaga secara efektif, dan bahwa narasi yang disajikan kepada publik tidak sekadar mengglorifikasi eksotika kolonial, tetapi mengundang refleksi atas pengalaman sejarah yang kompleks bagi masyarakat Bengkulu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, pertama, bahwa secara historis Benteng Marlborough merupakan pusat utama hegemoni kolonial Inggris di pantai barat Sumatra sejak awal abad ke-18. Benteng yang dibangun East India Company sekitar 1713–1719 di bawah Gubernur Joseph Collett ini sejak awal dirancang sebagai kompleks fortifikasi modern yang memadukan fungsi militer, administratif, dan ekonomi, dengan peran strategis sebagai basis pertahanan, kantor pemerintahan kolonial, dan gudang serta pengendali perdagangan lada di wilayah Bengkulu. Kedudukan tersebut menempatkan Benteng Marlborough sebagai simpul penting dalam jejaring kekuasaan dan ekonomi kolonial Inggris, yang kemudian berlanjut ke rezim Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan awal pembentukan negara Indonesia, sehingga menunjukkan kontinuitas fungsi strategis lintas rezim. Kedua, dari sisi transformasi, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Benteng Marlborough menjadi cagar budaya tidak terjadi secara linier, melainkan melalui proses bertahap: mula-mula berfungsi sebagai markas Polri pascakemerdekaan, kemudian menjadi instalasi dan barak TNI AD/Kodim selama beberapa dekade, hingga akhirnya dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir 1970-an untuk dipugar dan ditata sebagai objek wisata sejarah.

Puncak transformasi tersebut tercapai ketika Benteng Marlborough ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 2004, yang mengubah status hukumnya dari sekadar aset pertahanan menjadi objek pelestarian yang dilindungi dan dimaknai sebagai warisan budaya serta identitas lokal Bengkulu. Dengan demikian, kedua temuan ini menegaskan bahwa Benteng Marlborough tidak hanya penting sebagai artefak fisik kolonial, tetapi juga sebagai ruang di mana negara dan masyarakat menegosiasikan ulang ingatan dan makna atas masa lalu kolonial dalam kerangka kebudayaan Indonesia kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

Abas Musofa, A. (2018). Bengkulu dalam Jaringan Pelayaran Pantai Barat Sumatra Abad XVIII-XIX M. IAIN Bengkulu.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4202/>

-
- Abdillah, F., & Team, R. T. (2026, January 22). Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru. *Belajar Gratis Di Rumah Kapan Pun! | Blog Ruangguru*. <https://www.ruangguru.com/blog/kehidupan-politik-dan-ekonomi-masa-orde-baru>
- Arifin, F. (2023). *Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah*. Deepublish.
- Dalidjo, N. (2020). *Rumah di Tanah Rempah – Penjelajahan Memaknai Rasa dan Aroma Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fort Marlborough: Berkisah Tentang Kekuasaan Inggris di Bengkulu. (2018, November 13). *Kelanaku*. <https://kelanaku.com/2018/11/13/fort-marlborough-berkisah-tentang-kekuasaan-inggris-di-bengkulu/>
- Hadinata, R. J. S., Muhamad Satria Nugraha, Didik Pradjoko, Livia Ersi, Refni Yulia, Yudi Subiantoro, Tri. (2026). *Sejarah Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia*. Penerbit Naga Pustaka.
- Hafiful Hadi Sunliensyar. (2025). *Sejarah Bengkulu dalam Tulisan Seorang Pangeran 1859 M: Suntingan Naskah Asal-Usul Bangkahulu (ML 143)*. http://archive.org/details/20251219_20251219_0247
- Januario, R. (2019). *Kehidupan Sosial Keagamaan Bengkulu Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 [Diploma, IAIN BENGKULU]*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3859/>
- Joseph Collett. (1933). *Private letter books of Joseph Collet: Sometime governor of Fort St. George, Madras*. Longmans, Green, London. <http://archive.org/details/dli.csl.4619>
- kemendikdasmen. (n.d.). *Cagar Budaya Benteng Marlborough*. Retrieved May 19, 2026, from <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/budayakita/cagarbudaya/objek/KB000059>
- Kusuma, F. J., Syarifuddin, S., & Alian. (2022). Perkembangan Obyek Wisata Benteng Marlborough Tahun 2013-2019. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2), 1-22. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jps/article/view/26186>
- Marsden, W. (1811). *The history of Sumatra: Containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation to the ancient political state of that island ; 1754-1836*. London : Printed for the author, by J. McCreery, and sold by Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown. https://archive.org/details/McGillLibrary-rbrc_blackerwood_history_sumatra_folioDS6461M361811-20443/page/n17/mode/1up
- Marzuki, N. (n.d.). *MENGENAL LEBIH DEKAT: BANGUNAN BERSEJARAH INDONESIA*. Pacu Minat Baca.
- medcom.id. (n.d.). *Benteng Marlborough, Peninggalan Sejarah inggris di kota bengkulu*. Osc.Medcom.Id. Retrieved May 19, 2026, from <https://osc.medcom.id>
- Qhodiri, H. (2021). *Strategi Komunikasi Pemasaran Benteng Marlborough Oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Minat Wisatawan*. <https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/31179>
-

-
- Serasi, R., & Hakim, M. A. R. (2019). TIME RECONCILIATION ON FORT MARLBOROUGH'S DESIGN AND FUNCTIONS (PENYESUAIAN MASA MENGENAI REKA BENTUK DAN FUNGSI KUBU MARLBOROUGH). *Jurnal Arkeologi Malaysia*, 32(1).
<https://www.arkeologimalaysia.org.my/jurnalarkeologi/index.php/jurnalarkeologi/article/view/196>
- Siratjudin. (2025). *Benteng Marlborough: Warisan Kolonial Inggris di Tanah Bengkulu* - RRI.co.id. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya.
<https://rri.co.id/bintuhan/regional/1519051/benteng-marlborough-warisan-kolonial-inggris-di-tanah-bengkulu>
- Sulasman, H. (2014). Metodologi Penelitian Sejarah. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Taufiq, K. W. (2022). *The Memories of Benteng Marlborough Bengkulu dalam Foografi Dokumenter* [Skripsi, Institut Seni Indonesia Padangpanjang].
<https://repository.isi-padangpanjang.ac.id/1647/>
- Tedy, A., Puspitasari, A., & Purnamasari, E. (2025). Jejak Benteng Peninggalan Inggris Di Bengkulu (Tinjauan Historis- Filosofis). *AL Maktabah*, 10(1), 81-96.
<https://doi.org/10.29300/mkt.v10i1.3718>
- ValidNews. (2022). *Menatap Keperkasaan Arsitektur Inggris Di Benteng Marlborough*. ValidNews. <https://validnews.id/kultura/menatap-keperkasaan-arsitektur-inggris-di-benteng-marlborough>
- Wikipedia. (2026). Benteng Marlborough. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Benteng_Marlborough&oldid=28962517